

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR ABSTRAKSI

Tujuan pembuatan SKRIPSI ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai politik luar negeri Indonesia, baik secara teoritis ataupun secara nyata. Selaian itu juga untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyelewengan politik luar negeri bebas aktif selama kurun waktu antara tahun 1959-1965. SKRIPSI ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab menyajikan data-data.

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia ternyata membawa konsekuensi bagi Indonesia. Bila tidak berhati-hati bersikap Indonesia akan terseret dalam kancah pertarungan Ideologi yang terjadi waktu itu. Oleh karenanya dalam menentukan pola-pola hubungan dengan negara lain harus tepat, tanpa meninggalkan kepentingan nasional yang harus diutamakan. Polapola hubungan dengan negara lain yang dipilih Indonesia itu dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif.

Politik luar negeri bebas aktif mengandung dua pengertian bebas dan aktif. Bebas maksudnya sikap Indonesia terhadap perdamaian ditujukan untuk memperluas dan membela perdamaian, sedang sikap terhadap kedua blok yang bertentangan tidak memilih pihak. Aktif maksudnya upaya Indonesia untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri bebas aktif mempunyai tiga landasan yakni, landasan Ideal Pancasila, landasan struktural UUD 1945 serta landasan operasional yang meliputi Ketetapan MPR, Kebijakanaksanaan yang dibuat Presiden serta peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Sasaran dan tujuan politik luar negeri bebas aktif terbagi dalam tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang terumus dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan tujuan jangka pendek ditentukan sesuai dengan kebutuhan nasional dalam jangka waktu tertentu.

Tidak selamanya politik luar negeri bebas aktif dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan dan arah tujuannya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah situasi dalaam negeri saat itu. Presiden Sukarno yang mendapatkan kembali kekuasaanya lewa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mempergunakannya untuk memusatkan kekuasaan di tangannya. Dengan demikian semua Lembaga-Lembaga Kenegaraan beradaa di bawahnya. Ide Presiden Sukarno tentang Nasakom memungkinkan Partai Komunis

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia muncul menjadi satu partai yang kuat, sementara AD tidak bisa berbuat banyak karena taktik yang dipilih PKI tepat. Sementara keadaan ekonomi buruk akibat perdagangan dikuasai golongan tertentu yang bisa memanipulasi harga barang, jumlah barang yang beredar di pasaran. Akibat keadaan itu harga barang tinggi dan terjadi inflasi. Pemotongan nilai nominal uang yang diharapkan bisa menanggulangi masalah tersebut semakin memperburuk keadaan.

Di pihak lain hubungan Indonesia-RRC semakin erat, kedua negara berambisi untuk menjadi satu pimpinan. RRC mempunyai pertimbangan tersendiri untuk menjadikan Indonesia sebagai mitranya. Eratnya hubungan Indonesia-RRC berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang diambil Indonesia. Contohnya masalah Malaysia, Indonesia menganggap sebagai tindakan kaum imperialis yang bila dikaji sebenarnya merupakan masalah dalam negeri Malaysia. Bahkan Indonesia berani menyatakan keluar dari keanggotaan PBB setelah Malaysia dipilih menjadi anggota anggota tidak tetap DK PBB. Tindakan itu hanya didukung oleh RRC saja. Contoh kasus lain ketika Konferensi Gerakan Non Blok dilakukan. Indonesia mencetuskan ide Nefos kontra Oldefos yang membawa perpecahan pandangan Gerakan Non Blok. Ide ini sebenarnya diilhami dialektika yang dikenal dalam komunisme.

Akhirnya harapan politik luar negeri bebas aktif, tinggallah harapan. Kenyataan yang terjadi politik bebas aktif dibawa arus sehingga keluar dari relnya. Fanatisme anti imperialisme dan anti kolonialisme telah membutakan pandangan Presiden Sukarno. Itu yang menyebabkan kebebasan Indonesia terkekang karena harus selalu mengacu kepada RRC. Tidak dipungkiri sikap fanatisme itu tetap menjadikan Indonesia aktif tetapi tidak terarah. Munculnya Orde Baru membawa politik luar negeri bebas aktif kemabli ke arah dan tujuan politik luar negeri bebas aktif sebenarnya.